

POLITIK KEWARGAAN SEBAGAI PERWUJUDAN DARI PANCASILA UNTUK MENGATASI PERSOALAN KEADILAN DALAM INDONESIA SEBAGAI NEGARA YANG PLURAL

Andheralvi Isaiah Lontoh¹⁾ Yudha Nugraha Manguju²⁾

^{1,2)} *Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta*

¹⁾ *avilontoh26@gmail.com*

Received: 05 Juli 2023 /Accepted: 29 September 2023 /Published: 31 Desember 2023

Abstrak

Politik bukanlah sesuatu yang buruk untuk dilakukan oleh suatu negara. Bahkan setiap lembaga ataupun negara memerlukan gerakan politik untuk memastikan kelangsungan dan kesejahteraannya. Indonesia yang memiliki Pancasila sebagai dasar negara juga tidak lepas dari gerakan-gerakan politik. Pancasila sendiri hadir selain menjadi dasar negara merupakan nilai-nilai hidup bagi masyarakat Indonesia yang bersifat plural. Banyak upaya-upaya ketidaksetujuan terhadap apa yang ditawarkan oleh Pancasila sehingga muncul berbagai gerakan politik yang mengakibatkan rusaknya keadilan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan di tengah-tengah negara Indonesia. Mayoritas menjadi prioritas dan minoritas diberantas, menjadi gambaran umum dalam praktik yang ada di Indonesia. Walaupun demikian, politik kewargaan justru dapat menjadi perwujudan dari Pancasila dengan melihat semua warga negara memiliki kedudukan yang sama dan memiliki hak yang sama untuk menerima keadilan.

Kata-kata kunci: Politik Kewargaan, Pancasila, Keadilan, Plural.

Abstract

Politics is not something bad for a country to do. Even every institution or state needs a political movement to ensure its continuity and welfare. Indonesia, which has Pancasila as the basis of the state, is also inseparable from political movements. Pancasila itself is present in addition to being the basis of the state is a living value for Indonesian society which is plural. Many attempts to disagree with what was offered by Pancasila resulted in various political movements that resulted in the destruction of justice in the implementation of government duties in the midst of the Indonesian state. The majority is a priority and the minority is eradicated, becoming a common picture in existing practices in Indonesia. However, citizenship politics can also be a manifestation of Pancasila by seeing that all citizens have equal standing and have the same right to receive justice.

Keywords: Politics; Citizenship; Pancasila; Justice; Plural.

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk yang memiliki jiwa sosial yang tinggi dan bahkan dikatakan sebagai makhluk sosial oleh karena hal tersebut. Terlepas daripada setiap ciri khas dari masing-masing orang, pada akhirnya manusia akan membutuhkan satu dengan yang lainnya untuk bertahan hidup ataupun untuk bergerak maju. Dengan kata lain, untuk berkomunikasi serta membangun ikatan atau relasi dengan setiap orang merupakan suatu kebutuhan dari manusia untuk mendapatkan dan mencapai sesuatu dalam hidupnya. Seringkali relasi yang terbentuk bukanlah suatu hubungan yang terjadi oleh karena ketidaksengajaan, tetapi bisa terjadi oleh karena memiliki tujuan yang sama dengan tujuan pribadi sehingga ketika hubungan ini meluas menjadi tujuan banyak orang maka sekelompok orang ini akan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang mereka miliki ini. Dalam mencapai tujuan ini, akan ada banyak hal yang dikesampingkan yang tidak berhubungan dan bahkan bisa mengancam kerja sama mereka. Hal-hal yang akan dikesampingkan adalah perbedaan-perbedaan yang ada pada mereka seperti ras, suku dan agama, serta tujuan-tujuan pribadi yang terkesan untuk memanfaatkan relasi yang ada untuk mencapai keuntungan pribadi.

Kepentingan pribadi seringkali dilihat sebagai sesuatu yang lebih penting daripada kepentingan kelompok, ataupun untuk skala yang lebih besar seperti kepentingan atau keyakinan kelompok-kelompok tertentu seperti kelompok agama, komunitas nasional dan bermacam-macam bentuk organisasi merasa tujuan mereka lebih penting daripada kepentingan secara keseluruhan seperti tujuan dari suatu negara. Pada akhirnya hal-hal yang seperti ini akan membawa perpecahan dan pertentangan satu dengan yang lain sehingga bukan tidak mungkin dapat berakhir pada aksi kekerasan antar kelompok ataupun berakhir pada *civil war* atau perang saudara. Untuk menghindari hal-hal yang seperti ini suatu negara harus memiliki gambaran utama untuk menjadi tujuan secara keseluruhan untuk berjalan bersama-sama. Hal ini menunjukkan bahwa diluar daripada tujuan dari tiap-tiap kelompok, masih ada tujuan lebih penting yang harus dilakukan oleh tiap-tiap kelompok dan kedudukannya lebih dari tujuan masing-masing. Tentunya, tujuan ini harus bisa mewakili setiap kepentingan dari berbagai macam kelompok yang ada sehingga tidak terjadi ketidakadilan dalam perjalanan untuk mencapai tujuan tersebut. Hal ini sangat dibutuhkan setiap negara apalagi untuk negara yang memiliki berbagai macam keragaman. Keragaman dalam masyarakat menyangkut bahasa etnisitas, agama, dan sebagainya adalah suatu fakta yang tidak dapat dihindari. Perbedaan menjadi suatu bagian dari tiap negara.¹

Sebagai negara yang memiliki beragam perbedaan, bangsa Indonesia juga harus waspada terhadap segala situasi dan kondisi yang melemahkan persatuan bangsa. Kewaspadaan harus diperhatikan karena jika tidak, maka akan berdampak pada kurangnya stabilitas nasional yang pada akhirnya mengganggu upaya bangsa Indonesia untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional.² Kemajemukan bangsa Indonesia dan tatanan geografis yang berpulau-pulau menjadi tantangan negara untuk selalu dapat menjaga stabilitas nasional dan politik dengan menegakkan hukum sebagai panglima tertinggi.³ Dalam kehidupan masyarakat juga masih terdapat berbagai macam bentuk ketidakadilan yang pada akhirnya berujung pada kekerasan, dan juga korupsi, kolusi dan nepotisme yang masih belum bisa diatasi.⁴ Hal ini terjadi bukan karena Indonesia tidak memiliki nilai-nilai untuk dijadikan dasar, tapi justru terjadi disorientasi dan belum dihayatinya nilai yang telah susah payah dibentuk oleh para pejuang kemerdekaan. Indonesia sebagai negara yang plural ini dipersatukan dengan istilah *Bhinneka Tunggal Ika* yang memiliki arti “berbeda-beda tapi tetap satu”. Dari istilah ini lahirlah apa yang disebut sebagai dasar negara yang

¹ Zainal Abidin Bagir dkk., *Pluralisme Kewargaan: Arah baru Politik Keragaman di Indonesia* (Bandung: MIZAN, 2011), 38.

² Helena Ras Ulina Sembiring dan Ima Rohimah, *Membangun Karakter Berwawasan Kebangsaan*, ed. oleh Haryanto (Malang: Media Nusa Creative, 2017), 3–4.

³ Ilham Yuli Isdiyanto, *Dekonstruksi Pemahaman Pancasila: Mengenali Jati diri Hukum Indonesia.*, ed. oleh Devi (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2019), 2.

⁴ Sembiring dan Rohimah, *Membangun Karakter Berwawasan Kebangsaan*, 65.

berfungsi untuk mempersatukan Indonesia yang plural ini, yaitu Pancasila.

Menjadikan Pancasila sebagai dasar negara merupakan salah satu keunikan dari bangsa Indonesia yang berbeda dengan negara yang lain. Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa Indonesia, dan juga berfungsi sebagai dasar negara dan pandangan hidup Pancasila yang mengandung konsep-konsep dasar mengenai cita-cita Indonesia. Pancasila dan nilainya dapat dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia karena pandangan hidupnya berdasarkan apa yang melekat pada budaya dan pandangan hidup masyarakat.⁵ Dapat dikatakan, selain menjadi dasar dalam berkembang dan berperilaku, Pancasila juga merupakan cita-cita yang sampai saat ini masih dikerjakan oleh bangsa Indonesia sebagai pekerjaan rumah yang harus dituntaskan. Cita-cita ini belum bisa terwujud oleh karena beberapa hal yang seringkali menjadi tembok pemecah belah di dalam negara Indonesia. Munculnya kelompok-kelompok yang berbau agama maupun budaya dengan paham radikal mereka sehingga sifat plural yang ada di Indonesia ini justru menjadi suatu kelemahan yang fatal bagi negara untuk bertumbuh. Gerakan-gerakan politik praktis yang diterapkan justru membawa perpecahan, diskriminasi dan ketidakadilan dalam pemerintahan. Politik bukanlah sesuatu yang buruk untuk menerapkan cita-cita negara yang ada pada Pancasila. Namun, dibutuhkan gerakan dan paham politik yang berbeda dengan praktik-praktik yang merugikan dan tidak bersifat toleransi dengan keberagaman yang ada di Indonesia.

Politik Kewargaan yang melihat kepentingan dari seluruh warga negara merupakan paham yang bisa menjadi perwujudan dari Pancasila dalam pemerintahan. Berbeda dengan paham politik yang lain, politik kewargaan mengesampingkan perbedaan-perbedaan yang ada di negara yang bersifat plural seperti Indonesia ini, di mana kepentingan warga negara menjadi prioritas dari paham politik ini. makalah ini akan membahas bagaimana politik kewargaan menjadi perpanjangan ataupun perwujudan dari pancasila untuk mencapai cita-cita negara Indonesia, yaitu keadilan bagi setiap masyarakat yang hidup di tengah-tengah negara yang plural.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan suatu keadaan masyarakat secara khusus mengenai politik kewargaan dalam praktek kehidupan politik masyarakat Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah kajian pustaka, yaitu kegiatan analisis teks atau wacana untuk melihat *setting* tertentu dalam suatu peristiwa, baik tindakan langsung maupun tulisan yang akan diteliti untuk memperoleh fakta yang tepat.⁶ Pengumpulan data akan dilakukan melalui jurnal-jurnal dan buku-buku yang telah ditulis oleh sejumlah peneliti kajian politik yang berkaitan dengan pancasila dan politik kewargaan untuk mengkaji hubungan keduanya terhadap proses politik di Indonesia. Berdasarkan analisis data dari kajian tersebut akan diambil kesimpulan untuk membantu peneliti memahami persoalan mendasar dari usaha politik kewargaan dalam masyarakat Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pancasila Sebagai Dasar dan Cita-Cita Negara

Sebagai dasar negara Indonesia, Pancasila terbukti sebagai salah satu media yang menjadi pemersatu dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan juga bernegara di Indonesia.⁷ Pancasila sudah diajarkan kepada setiap masyarakat Indonesia dari masih usia dini dan selalu diulang-ulang dalam setiap tingkatan pendidikan. Dari sini dapat dilihat bahwa Pancasila ini merupakan hal yang penting apalagi untuk dipahami oleh setiap warga negara Indonesia. Pancasila sendiri selalu ditanamkan untuk menjadi dasar dari setiap cita-cita yang ingin digapai oleh masyarakat. Oleh karena itu, Pancasila harus bisa sesuai dengan seluruh rakyat Indonesia dan bukan hanya

⁵ Alvira Oktavia Safitri dan Dinie Anggraeni Dewi, "Pancasila Sebagai dasar Negara dan Implementasinya dalam berbagai bidang," *Universitas Muhammadiyah ENREKANG* Vol. 3, No. 1 (2021): 89.

⁶ Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)* (Literasi Nusantara Abadi, 2020), 7.

⁷ Safitri dan Dewi, 89.

orang-orang tertentu saja. Hal ini bukan tidak dilihat oleh para proklamator, oleh karena itu butuh perjuangan serta begitu banyak perundingan dari beberapa pihak untuk mencapai Pancasila saat ini. Hal ini juga disebutkan oleh presiden pertama Indonesia, yaitu Soekarno dengan mengatakan bahwa tidak ditemukan begitu saja melainkan digali dari sejarah panjang bangsa Indonesia.

Oleh karena itu, menurutnya memaknai Pancasila juga harus dituntut dari akar sejarahnya di dalam dinamika kenegaraan bangsa Indonesia kuno.⁸ Proses pembentukan dari Pancasila sendiri menggambarkan nilai-nilai serta maknanya, mulai dari pengaruh budaya serta keberagaman yang ada dari tiap-tiap pejuang serta pengaruh dari kebudayaan luar. Kehadiran dari Pancasila adalah suatu konsepsi universal yang disusun oleh Soekarno, tidak hanya diterima dalam dinamika negara Indonesia, tetapi juga dapat menjangkau universalitas dunia.⁹ Soekarno menggali kembali nilai-nilai luhur budaya yang ada pada Pancasila ini, dan pada tanggal 1 Juni 1945 barulah Pancasila disuarakan menjadi dasar negara dan diresmikan pada 18 Agustus 1945 satu hari setelah proklamasi kemerdekaan dengan dimasukkannya kelima Sila dari Pancasila ke dalam pembukaan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan bersumberkan budaya, adat istiadat, dan agama sebagai tonggakannya, nilai-nilai Pancasila diyakini kebenarannya dan senantiasa melekat dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia.

Pada awalnya Pancasila tidak langsung terbentuk menjadi Pancasila yang dikenal saat ini. Perbedaan terdapat dalam isi dari Pancasila yang diubah oleh para proklamator. Pada waktu Badan Penyelidik usaha-usaha kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) merumuskan Piagam Jakarta ini, ada keinginan dari sebagian anggota BPUPKI untuk mewajibkan pemeluk agama Islam di Indonesia menjalankan “*syariat/syariah*” dengan menggunakan kata-kata “Ketuhanan, dengan mewajibkan menjalankan Sjari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Namun, oleh karena Indonesia adalah negara yang bukan hanya terdiri dari satu keyakinan atau agama saja dan demi persatuan bangsa Indonesia yang segera akan diproklamasikan kemerdekaannya, maka muncullah kompromi dan toleransi dari para anggota BPUPKI untuk menghapuskan satu nilai itu.¹⁰ Setelah piagam Jakarta yang disahkan pada 22 Juni 1945, Mohammad Hatta mengungkapkan bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945, ia menerima kedatangan seorang opsir angkatan laut Jepang yang menyampaikan tentang keterberatan para warga Kristen terhadap isi dari Piagam Jakarta, apalagi bagian yang pertama. Dari sinilah muncul perdebatan antara pro dan kontra dengan hal tersebut. Dengan begitu perundingan bersama yang berlangsung itu pada akhirnya disepakati bahwa salah satu isi “Piagam Jakarta” terjadi perubahan pada sila pertama seperti yang dikenal sampai saat ini.¹¹

Perubahan-perubahan dalam memahami Pancasila berubah-ubah seiring berjalannya waktu. Dari masa ke masa posisi Pancasila ini bagi kehidupan bangsa berbeda-beda, ada yang pro dan ada juga yang kontra dengan kehadiran dari Pancasila ini. Salah satu contoh yang terjadi ketika Soeharto memerintah pada masa orde baru. Meskipun pada orde baru presiden bersikap otoriter dalam pelaksanaan pemerintahannya, akan tetapi pada orde baru terdapat beberapa kelebihan. Pemerintahannya berhasil mempertahankan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara sekaligus berhasil memberantas paham komunis di Indonesia, diajarkannya program P4 di sekolah-sekolah sebagai pembekalan, diperbolehkan adanya organisasi masyarakat sesuai dengan asas Pancasila, dan berhasil menekan tingkat inflasi yang sangat tinggi pada tahun 1966. Di sisi lainnya ada beberapa nilai Pancasila yang berperan pasif dalam kehidupan di masa orde baru, salah satu contoh yang terjadi adalah diskriminasi terhadap warga keturunan Tionghoa, mereka juga dilarang untuk berekspresi dan juga terjadi banyaknya kasus korupsi, kolusi dan nepotisme, adanya penindasan ideologis dan fisik, dan terjadinya pelanggaran HAM.¹²

Pada zaman reformasi terjadi perubahan wacana dan paradigma mengenai keberadaan

⁸ Isdiyanto, *Dekonstruksi Pemahaman Pancasila*, 19.

⁹ Isdiyanto, 21.

¹⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah Hukum Indonesia* (Jakarta: KENCANA, 2021), 71–72.

¹¹ Sjahdeini, 74.

¹² I Made Bagus Andi Purnomo, *Buku Ajar Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi*, ed. oleh Komang Agus Widiantara (Bali: Yayasan Mertajati Widya Mandala, 2020), 23.

Pancasila. Pada era reformasi ini juga digunakan sebagai arena kontestasi dan arena negosiasi. Selain itu, ada juga usaha-usaha untuk menyingkirkan Pancasila melalui berbagai macam gerakan-gerakan ormas ataupun kelompok-kelompok tertentu yang mengancam keutuhan bangsa. Pada era reformasi beberapa dari masyarakat mulai menggemari kehidupan yang saling berkelompok sehingga dapat memicu adanya fundamental, radikal dan kehidupan liberal yang dapat melunturkan nilai persatuan dan kesatuan. Selain penyimpangan ideologi, terjadi juga penyimpangan ekonomi dan perubahan yang signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang tidak berasaskan Pancasila. Walaupun demikian, pemerintah di era reformasi mengeluarkan beberapa kebijakan seperti bersikap tegas dan bijak terhadap konflik yang terjadi karena perbedaan golongan, ras etnik sehingga usaha yang dilakukan dengan cita-cita terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, pemerintah juga bersikap tegas dan memberi keadilan dalam mengambil keputusan demi kesejahteraan.¹³

Menurut Wahyu, W (2015) nilai-nilai dari Pancasila bersifat fundamental, mutlak, universal dan abadi dan nilai-nilai yang merupakan berasal dari luhur budaya masyarakat yang tersebar di seluruh Nusantara. Nilai-nilai seperti ini perlu diimplementasi dalam berbagai bidang demi menjaga eksistensi bangsa Indonesia, salah satunya dalam bidang Politik. perkembangan Pancasila dalam bidang politik harus berdasarkan kepada ontologis manusia yang pada kenyataan objektif bahwa manusia merupakan bagian dari subjek negara, maka dari itu kehidupan politik harus benar-benar direalisasikan demi harkat dan martabat manusia. Perkembangan Politik negara pada proses reformasi harus mendasar kepada moralitas seperti halnya nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila pada esensinya sehingga beberapa bidang politik yang selalu menghalalkan segala cara demi mendapatkan hasil harus segera diakhiri. Pada bidang politik ini nilai-nilai Pancasila dapat diimplementasikan seperti saling menghormati dan menghargai pilihan setiap orang, aktif dan ikut serta dalam proses pemilihan pemimpin baik pada tingkatan desa sampai dengan tingkatan negara, dan tidak menyebarkan isu terhadap lawan politik dengan berita *hoax* atau tidak benar dan bersifat fitnah.

Gerakan Politik Di Indonesia

Segala sesuatu yang ada saat ini dapat dikatakan merupakan hasil perjuangan dari pendahulu-pendahulu yang memperjuangkan kemajuan dan kesejahteraan Indonesia dari kepemimpinan mereka. Banyak hal yang diupayakan untuk mendapatkan kepemimpinan ini dengan berbagai macam gerakan-gerakan politik yang juga digunakan untuk mencapai apa yang menjadi tujuan mereka. Sejarah negara Indonesia sampai saat ini tidak terlepas dari berbagai macam gerakan-gerakan politik, baik yang membawa kesatuan dan kesejahteraan, dan juga membawa perpecahan di tengah-tengah negara Indonesia yang memiliki begitu banyak keberagaman bukan hanya dari segi keyakinan tetapi juga dari segi suku, ras, budaya dan bahasa.

Pada saat ini ada beberapa gerakan politik yang sangat mencolok dalam sistem pemerintahan Indonesia yang pada akhirnya mengancam kesatuan negara Indonesia. Gerakan-gerakan politik ini merupakan gerakan yang muncul kembali dan menjadi perhatian pada kepemimpinan negara. Gerakan-gerakan politik tersebut adalah; Politik Identitas, Politik Radikal dan Politik Sektarian. Selain itu juga, penerapan politik Emosi juga bisa dilihat apalagi pada pemilu tahun 2017 pemilihan Gubernur DKI Jakarta dalam menggiring massa untuk mencapai tujuan seseorang.

1. Politik Identitas

Saat ini gerakan Politik Identitas sangat terlihat di negara Indonesia sebagai negara yang memiliki keragaman. Dengan kata lain, Indonesia menghadapi krisis keamanan, krisis politik, dan krisis politik yang berkepanjangan, terjadi perang saudara dengan membawa simbol-simbol agama, terorisme, kejahatan kemanusiaan, serta krisis ekonomi yang mengancam stabilitas dan kesatuan negara.¹⁴ Dalam kaitannya terhadap Pancasila, maka sudah seharusnya Pancasila

¹³ Purnomo, 23-24.

¹⁴ Leli Salman Al-Farisi, "POLITIK IDENTITAS : Ancaman Terhadap Persatuan dan kesatuan Bangsa dalam Negara Pancasila," *FISIP Universitas Wiralodra* Vol. No. 2 (Februari 2018): 77.

menjadi miliki bersama sebagai anak bangsa, bukan hanya milik kelompok-kelompok tertentu. Semua harus merasa memiliki Pancasila, tidak ada skat-skat SARA dan dukungan politik, bahkan dalam posisi sebagai penguasa pun bukan lagi penafsir tunggal Pancasila.

Politik Identitas ini seharusnya dapat dilebur menjadi politik kebangsaan, politik negara tidak lagi mengedepankan egoism sektoral, egoism kelompok, egoism partikularistik karena politik kebangsaan, politik kenegaraan, dan politik nasionalisme yang berdasarkan Pancasila.¹⁵ Politik kebangsaan Pancasila yang bersifat multi-kultur secara konseptual memiliki makna sebagai anti-tesis dari praktik politik identitas yang bersifat partikularistik. Politik *divide et impera* yang pernah digunakan oleh kaum kolonial Belanda pada sejarah perjuangan kemerdekaan tidak lain adalah menggunakan pola-pola dan metode praktik politik identitas sebagai cara efektif melemahkan kekuatan nasional untuk melawan kaum kolonial saat itu. Begitu juga di dalam sejarah konflik-konflik politik aktual di dunia, konflik atas politik identitas terjadi di berbagai bangsa.¹⁶ Dari sini dapat dipelajari bahwa politik identitas ini dapat membawa perpecahan dalam suatu pemerintahan negara jika tidak ada pengelolaan yang baik dan kritis. Salah satu contoh yang terjadi ketika pesta demokrasi lokal pertarungan politik pada pilkada DKI Jakarta 2017 lalu telah meninggalkan beberapa catatan penting tentang fenomena kemunculan politik identitas yang akan problem mendasar dalam sistem demokrasi yang sedang kita tata bersama saat ini. Kegaduhan politik nasional telah diwarnai dengan merebaknya berbagai isu-isu partikularistik tentang pribumi dan non-pribumi, Islam dan non Islam, China vs anti China, Khilafah Islam vs Pancasila merebak dan menjadi lumrah dibahas, digagas, dihembuskan dalam konstestasi kekuasaan di daerah maupun nasional dengan dalih demokrasi.¹⁷

Menurut Muhtadi, ia menegaskan bahwa fenomena politik Identitas yang dikemas dalam populisme Islam kalau berada di tangan para pemimpinan dan politisi yang tidak berani melawan arus, populisme tersebut akan berubah menjadi “racun” yang akan membunuh demokrasi secara perlahan, tapi pasti.¹⁸ Berbicara tentang kejatuhan suatu negara akibat politik identitas ini, dapat dilihat dari konteks politik global dengan sejarah kekejaman politik yang dilakukan oleh Hitler dan Nazi ketika menjadi penguasa di Jerman. Sebenarnya Identitas sebagai Politik pada dasarnya tidak masalah, karena itu bagian dari realita dari mana tiap orang berasal, yang menjadi masalah ketika identitas ini diamplifikasi, dimanipulasi untuk target-target politik dengan membenturkan dengan identitas dari lawan politik. Dan yang paling bahaya dari gerakan politik ini adalah ketika politik identitas dalam penerapannya politik ini mengesampingkan rasionalitas, dari hal ini akan banyak sekali rentetan akibatnya, bisa kebijakan yang tidak tepat, kebijakan yang sekedar populis.¹⁹

Politik yang mengatasnamakan identitas akan dapat membawa dampak adu domba antara pihak satu dengan yang lainnya. Terlebih lagi jika berkaitan dengan identitas baik isu agama atau personal maka hal ini akan dirasa lebih sensitif. Tentunya hal ini berpengaruh dengan keberadaan negara Indonesia yang pluralisme. Pluralisme sendiri mengimplikasikan pada tindakan yang bermuara pada pengakuan kebebasan beragama, kebebasan berpikir, atau kebebasan mencari informasi, sehingga untuk mencapai pluralisme diperlukan adanya kematangan dari kepribadian seseorang.²⁰ Indonesia yang memiliki ciri khas sebagai negara pluralism tentunya harus bisa menghindari bahayanya dari Politik identitas.

Selain dari segi agama, Politik identitas juga disebut sebagai wujud dari gerakan etnisitas yang juga seringkali menimbulkan pertentangan antar kelompok sebagai konsekuensi dari relasi yang sifatnya diametral. Dengan kata lain, ketidakharmonisan antar-etnis ini merupakan bagian

¹⁵ Al-Farisi, 78.

¹⁶ Al-Farisi, 78.

¹⁷ Al-Farisi, 79.

¹⁸ Al-Farisi, 84.

¹⁹ Al-Farisi, 85.

²⁰ Al-Farisi, 87.

dari persoalan yang ada dalam konteks politik identitas.²¹ Hal ini juga menimbulkan polarisasi isu pribumi dan non-pribumi juga tak bisa dianggap sebagai angin lalu. Ketika masalah ini muncul dengan korban yang menelan korban jiwa tak terperikan pada jelang runtuhnya rezim orde baru. Isu non-pribumi dikoaar-koarkan untuk menyerang mereka yang berkulit putih dan bermata sipit, identitas yang kini sering disebut dengan istilah ‘aseng’.²²

Pluralisme bangsa Indonesia merupakan sebuah kenyataan yang seharusnya dapat dikapitalisasi menjadi sumber kekuatan politik untuk membangun sistem demokrasi yang lebih kuat namun tetap harus ramah dengan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara. Tentunya dibutuhkan gerakan-gerakan politik yang dapat menjadi anti-tesis dari politik identitas ini jika persatuan Indonesia masih menjadi cita-cita dari negara Indonesia.

2. Politik Radikal

Selain politik identitas yang terkenal dan masih diterapkan dalam sistem pemerintahan Indonesia, ada juga gerakan politik yang bertumbuh dan akhirnya juga mengancam kesatuan Indonesia dalam mencapai cita-citanya melalui Pancasila. Ketika berbicara tentang masalah radikalisme, maka hal pertama yang muncul dalam pikiran adalah persoalan yang masuk ke dalam domain politik, yaitu bagaimana sesungguhnya radikalisme terjadi merupakan bentuk negara yang dilakukan oleh perangkat kekuasaan terhadap warga negaranya, atau tindak radikalisme yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain yang dinilai memiliki sistem dan kepentingan politik yang berbeda, atau setidaknya unsur politik diterjemahkan sebagai adanya pihak lain campur tangan dalam fenomena radikalisme yang terjadi.²³ Pemahaman lebih jauh tentang radikalisme dalam perspektif politik, akan sampai pada pemahaman, bahwa sesungguhnya pelaku radikalisme tidak hanya negara terhadap warga negaranya, tetapi juga dapat dilakukan oleh masyarakat terhadap rezim yang berkuasa ataupun pemerintah yang menjabat pada waktu itu.²⁴ Hal ini juga yang terjadi dalam perkembangan gerakan politik yang ada di Indonesia yang memunculkan politik radikal.

Radikal dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai suatu yang amat keras untuk perubahan, sedangkan radikalisme adalah paham yang menginginkan perubahan sosial dan politik dengan cara drastis dan sering kali menggunakan cara-cara kekerasan. Perubahan radikal tidak selalu berarti negatif, tetapi radikalisme lebih cenderung berkonotasi negative karena pemakaian cara-cara ekstrem, kekerasan dan destruksi terhadap tatanan dan nilai yang ada demi mencapai tujuan.²⁵ Oleh karena itu, Untuk memahami perkembangan politik radikal ini terlebih khusus di Indonesia, perlu untuk memeriksa kembali sejarah berdirinya Indonesia yang diawali dengan hasrat untuk mendirikan negara merdeka berdasarkan Islam pada masa pra-kemerdekaan.

Para kaum Muslim memiliki peranan penting dalam persiapan kemerdekaan Indonesia bersama dengan BPUPKI. Rapat-rapat persiapan bersama BPUPKI ini menghasilkan dua faksi politik besar, di mana masing-masing berusaha untuk menentukan dasar negara yang diinginkan menurut ideologi politiknya. Yang pertama adalah kelompok yang disebut “nasionalis Islam”, yang menginginkan negara berdasarkan Islam dan kelompok yang lain berbeda dengan itu adalah “nasionalis sekular”, yang menginginkan negara berdasarkan Pancasila.²⁶ Setelah itu, ketika PPKI mengambil alih proses persiapan kemerdekaan Indonesia yang dibentuk tiga bulan kemudian dan mencabut semua pasal-pasal yang berisi formula-formula Islam, maka terjadilah perubahan-perubahan serta ketidaksetujuan. Keputusan tersebut pada akhirnya berdampak penting pada sejarah Islam. Kemunculan dari ‘Model 1’ ini terutama disebabkan oleh keputusan kontroversial dari PPKI itu. Hal ini menyebabkann para kaum

²¹ Abdul Halim, *Sosiologi Politik Etnik: Studi Otoritas dan Demokrasi Lokal Masyarakat Madura*, ed. oleh Rifqy Faiza Rahman (Malang: Inteligencia Media, 2019), 60.

²² Al-Farisi, “Politik Identitas,” 87.

²³ Aghuts Muhaimin, *Transformasi Gerakan Radikalisme Agama: Dari sentral menjadi lokal* (Bandung: Rasi Terbit, 2019), 47.

²⁴ Muhaimin, 55.

²⁵ Aksin Wijaya, *Berislam Di Jalur Tengah* (Yogyakarta: DIVA PRESS, 2020), 245.

²⁶ Bagir dkk., *Pluralisme Kewargaan*, 77–78.

muslim merasa bahwa mereka punya alasan kuat mewujudkan model politik Islam, dan bukan hanya karena itu adalah gagasan yang mulia menurut mereka, melainkan juga karena itu dibutuhkan untuk mewujudkan kebenaran sejarah.²⁷

Sebagai suatu konsep, negara Islam memiliki sifat yang kabur. Hal ini dianut oleh gerakan Muslim progresif dan juga Muslim yang radikal. Di Indonesia, versi progresif negara Islam biasanya dikaitkan atau dihubungkan dengan Masyumi yang memiliki agenda politik tentang “mengislamkan” negara Indonesia dengan cara-cara demokratis. Berbeda dengan sisi ini, versi para radikal di lain pihak, biasanya dikaitkan dengan gerakan darul Islam yang adalah organisasi bersenjata yang berbahaya, di mana usaha mereka untuk “mengislamkan” Indonesia dengan menggunakan kekerasan dan bersifat anarkis.²⁸

Pada dasarnya, ada dua prinsip utama yang menjadi dasar versi progresif negara Islam: pertama, negara Islam bukan negara Teokratis; dan kedua, negara Islam menentang negara sekular. Yang pertama berarti bahwa tidak ada penyatuan agama dan negara di bawah elit agama, dan yang kedua berarti bahwa tidak ada pemisahan agama dan negara di bawah pemerintahan sekular.²⁹ Bagi para pendukung eksponen model I ini mereka tidak menerima tuduhan bahwa mereka berusaha untuk menjadikan sebuah negara *teokratis*, justru mereka berusaha untuk menyatukan agama dan negara dengan cara yang demokratis dan tidak dengan cara *teokratis*.³⁰ Selain itu, mereka juga menolak penerapan negara sekular, oleh karena mereka menganggap pemisahan sebagai perceraian agama dan politik tidak pernah dikenal dalam sejarah negara yang diperintah Muslim. Sekularisme adalah gagasan yang sama sekali tidak terbayangkan dalam tradisi politik Islam.³¹ Dengan demikian mereka tidak terlalu percaya dengan apa yang ditawarkan oleh Pancasila ditambah lagi dengan keputusan yang diambil oleh PPKI yang pada akhirnya menghilangkan nilai-nilai Islam dalam Pancasila pada “piagam Jakarta”.

3. Politik Sektarian

Berbicara tentang gerakan politik yang eksklusif, ada juga paham politik yang demikian, di mana dalam penerapannya juga memiliki beberapa ancaman untuk memecah belah suatu negara, yaitu Politik Sektarian. Pertama harus diketahui arti dari gerakan sektarianisme secara umum. Dalam pengertian kamus, ‘sektarianisme’ adalah “semangat atau fanatisme dan taklid berlebihan kepada aliran atau mazhab khususnya dalam agama”. Dalam konteks ini ‘sektarianisme’ dalam terminologi Arab disebut sebagai ‘*ta’ashub*’ yang terkait dengan *ashabiyah*. Sektarianisme juga merupakan istilah yang mengacu pada intoleransi, dan diskriminasi. Hal ini akan menjadi lebih bahaya lagi ketika mengacu pada kebencian yang muncul dengan memegang sikap superioritas keagamaan pada kelompok sendiri atau memandang pihak lain seagama sebagai inferioritas di tengah-tengah perbedaan di antara para pemeluk agama yang sama.³²

Dalam konteks yang terjadi di Indonesia, terdapat perkembangan dinamis menyangkut relasi agama dan politik ini. sebelumnya di zaman kolonial, agama memiliki peran ganda, yaitu: sebaga legitimasi kolonialisme sekaligus kritik sosial. Banyak tokoh agama, Muslim khususnya, yang bekerja dengan pemerintah kolonial, walaupun pada saat yang sama juga banyak di antara mereka yang menjadi pengkritik dan pemberontak kolonial. Setelah itu, memasuki pada masa orde lama, Presiden Soekarno di satu sisi mengakomodasi tokoh-tokoh Muslim tetapi pada waktu yang bersamaan melibas tokoh-tokoh Muslim yang kontra dengan kekuasaannya. Pada masa orde baru, Presiden Soeharto tidak tertarik untuk berhubungan dengan kelompok Islam meskipun pada awalnya mereka bersama dengan dia untuk mengantarkan jalan kekuasaan kepada Soeharto sebagai presiden berikutnya. Seiring berjalannya waktu, pada awal tahun

²⁷ Bagir dkk., 78.

²⁸ Bagir dkk., 81–82.

²⁹ Bagir dkk., 84.

³⁰ Bagir dkk., 85.

³¹ Bagir dkk., 88.

³² Arfan Nusi, “Pemikiran Islam dalam Bingkai Pergolakan Politik Sektarian,” *IAIN Sultan Amai Gorontalo* Vol. 2, No. 2 (Desember 2016): 180.

1990an, Soeharto akhirnya tertarik untuk menjalin hubungan dengan Islam dan mengaet kelompok kelas menengah teknokrat di bawah bendera Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) setelah terjadi friksi dengan sejumlah petinggi militer. Pada awalnya Soeharto tidak memberi ruang gerak sedikitpun untuk perkembangan Islam politik meskipun mendukung gerakan Islam kultural yang apolitis. Setelah jatuhnya Soeharto pada tahun 1998, keran kebebasan berekspresi dan berserikat yang dulu ditutup rapat-rapat, kini pun dibuka kembali lebar-lebar. Akibatnya, Indonesia seperti kebanjiran kelompok-kelompok Islam ekstrim-konservatif.³³ Benih-benih gerakan-gerakan ormas Islam yang dulu bersembunyi karena ketakutan dengan politik-otoriter Soeharto, kini bermunculan satu per satu. Meskipun banyak sisi positif-konservatif di era post-Soeharto ini seperti tumbuh-kembangnya demokrasi dan kebebasan sipil tetapi ada sejumlah sisi negatif-destruktif. Munculnya para penumpang gelap demokrasi seperti kelompok-kelompok Islam garis keras yang intoleran, anti-pluralisme, kontra-kebangsaan, mau menangnya sendiri, bebasnya mengkafirkan orang lain serta menggunakan berbagai tindakan dan cara kekerasan untuk memuluskan agenda dan kepentingan kelompoknya hanyalah beberapa contoh dari sisi negatif-destruktif di atas.³⁴

4. Politik Emosi

Selanjutnya adalah politik yang digunakan untuk menggiring massa, yaitu Politik Emosi. Politik emosi sendiri adalah gerakan politik yang mempengaruhi suatu kelompok dengan pengaruh psikis dan bahkan untuk menciptakan perlawanan terhadap lawan politik seperti yang terjadi di Indonesia pada PILKADA Gubernur Jakarta tahun 2017. Politik Emosi juga dikenal dengan istilah Populisme. Istilah ini muncul pada abad kedua puluh, di mana istilah ini sangat terkait dengan jenis kepemimpinan dan gerakan politik yang cukup umum di Amerika Latin. Gaya politik yang digunakan ini merupakan penggunaan kekuasaan oleh orang kuat politik untuk menarik “rakyat” sebagai lawan oligarki yang telah lama mengendalikan ekonomi.³⁵

Di Amerika terdapat seorang tokoh terkenal yang menerapkan gerakan politik Emosi atau populisme ini, yaitu Donald Trump yang telah menyapu seluruh dunia dan merusak prosedur demokrasi yang mapan, hak asasi manusia, kebebasan pers dan peradilan independen, semuanya dengan mengatasnamakan rakyat.³⁶ Populisme ini paling bisa didefinisikan sebagai wacana Politik yang menganggap masyarakat pada akhirnya dipisahkan menjadi dua kelompok yaitu, homogen dan antagonis, “rakyat murni” melawan “elit korup”. Dari sini dapat dilihat bahwa Populisme adalah gerakan yang menempatkan diri sebagai rakyat jelata, sangat tidak mempercayai para elit-elit pemerintahan dan menuntut kekuasaan untuk massa atau lebih tepatnya untuk para pemimpin populis yang mengaku mewakili rakyat. Selain itu, populisme sendiri merupakan kebalikan dari pluralisme karena membuat klaim bahwa masyarakat merupakan satu kesatuan yang homogeny, tanpa perpecahan internal. Para pemimpin yang populis memandang pluralism sebagai ancaman bagi persatuan dan homogenitas rakyat sejati dan memusuhi mereka yang tidak dianggap sebagai bagian dari rakyat sejati, dalam hal ini berbagai elit serta minoritas, imigran, atau orang asing.³⁷

Gerakan dari populisme ini biasanya dipimpin oleh orang-orang yang memiliki kharisma, karena tanpa seorang pemimpin yang berbicara atas nama “orang-orang sejati” dan yang memberi tahu mereka apa yang seharusnya dipikirkan, rasakan, dan yakini sebagai gerakan populis sebenarnya tidak mungkin. Pemimpin populis berbeda dengan politisi yang lain dalam hal mereka mengklaim hubungan langsung daripada hubungan yang dimediasi dengan orang-orang yang mereka ajak bicara.

Di Indonesia sendiri kembali lagi di mana perkembangan politik emosi tidak terlepas dari gerakan-gerakan organisasi masyarakat yang ada. Apalagi organisasi masyarakat yang berbau atau berlabelkan agama. Hal ni membuktikan religiusitas di tingkat masyarakat mempengaruhi

³³ Nusi, 182–183.

³⁴ Nusi, 183–84.

³⁵ Martin Van Bruinessen, “Traditionalist Muslims and Populism in Indonesia and Turkey,” *AFKAR* Vol. 40 (2021): 1–27.

³⁶ Van Bruinessen, 4.

³⁷ Van Bruinessen, 6.

setiap tindakan politik apalagi yang ada di Indonesia. Organisasi Islam memainkan peran yang begitu banyak sebagai penggerak politik utama di Indonesia sebagai mayoritas. Penekanan ini bukanlah sesuatu yang baru, karena dalam perkembangan politik di Indonesia dalam sejarah sudah dijelaskan tentang peran organisasi masyarakat dalam gerakan politik. Terdapat dua faktor yang membuat organisasi Islam relevan dalam memobilisasi dukungan politik, yaitu penyediaan layanan sosial dan hubungan kelembagaan dengan partai sebagai institusi.³⁸

Akhirnya hal ini menciptakan kesenjangan dalam perjalanan politik di Indonesia, oleh karena itu untuk mengisi kesenjangan ini, diperlukan pemahaman tentang peran emosi dalam politik. Dengan memperhatikan pengaruh dari organisasi Islam melalui fasilitas-fasilitas yang ada dalam memobilisasi politik, politik kontemporer Islam di Indonesia dikondisikan oleh “pengalaman dan ekspresi emosional”.³⁹ Dalam tulisan Nastiti dan Ratri menyoroti tentang proses di mana organisasi Islam mengelola dan mempertahankan penggunaan emosi untuk memobilisasi orang selama masa-masa pemilihan gubernur Jakarta tahun 2017.⁴⁰ Namun terdapat bahaya mengenai penggunaan emosi ini dalam pengelolaan politik dengan adanya ketidakpastian, ketakutan, kekhawatiran dan emosi-emosi lainnya yang dikendalikan. Untuk mengatasi kekhawatiran ini, digunakanlah konsep politik emotif. Politik emosi memperluas stimulus sebagai syarat mutlak yang membentuk politik dan agama bersama-sama menjadi instrument kekuasaan untuk mengerahkan pengaruh politik. beberapa instrument inilah yang digunakan bagi ormas Islam yang radikal untuk memobilisasi kebencian masyarakat terhadap lawan politiknya dengan mengangap kelompok LGBT, dan kelompok lain serta agama minoritas sebagai sesuatu yang sesat.

Gerakan-gerakan Politik yang telah dijelaskan di atas memiliki beberapa perbedaan dalam penerapannya, tetapi memiliki ancaman dalam hal yang sama yaitu terhadap persatuan dari negara-negara yang plural. Sehingga gerakan-gerakan tidak cocok untuk berkembang lebih jauh lagi di tengah-tengah negara Indonesia. Diperlukan paham yang baru untuk menjadi penggerak politik dalam negara Indonesia yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta setidaknya tidak mengganggu pluralisme yang ada di Indonesia dan tidak membawa perpecahan.

Politik Kewargaan Sebagai Perwujudan Pancasila

Pada dasarnya Pancasila dibentuk dan dibuat serta ditujukan untuk masyarakat Indonesia dengan maksud nilai-nilai dari Pancasila ini dapat diimplementasikan kepada semua orang bukan hanya kepada orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu saja. Banyak hal yang berusaha mencabut dan menggagalkan penerapan nilai-nilai Pancasila ini dengan gerakan Politik pemecah yang ada. Namun, di sisi lain ada gerakan politik yang dapat menjadi perwujudan dari penerapan Pancasila, yaitu Politik Kewargaan.

Pertama harus dipahami bersama bahwa kewarganegaraan merupakan dasar dari semua politik. hal ini adalah prinsip pengorganisasian hubungan antara negara dengan masyarakat pada negara-negara modern saat ini. Dengan kata lain, jika suatu pemerintahan terdiri dari negara dan rakyat, maka kewarganegaraan adalah tentang siapa orang-orang itu dan bagaimana mereka berhubungan antara rakyat dengan negara.⁴¹ Terdapat hubungan timbal balik antara warga negara bersama dengan pemerintah. Kewarganegaraan tidak bisa terlepas dari bagian suatu negara. Seorang ahli bernama Engin Isin mengemukakan pendapatnya tentang pembedaan studi kewarganegaraan kritis dengan yang konvensional dengan perhatian yang meningkat kepada politik dengan melihat dinamika yang terjadi di Indonesia sebagian besar secara informal.

Hal ini menyebabkan begitu banyak terjadinya kesenjangan antara hukum yang tertulis dan hukum dalam praktik yang pada akhirnya membuat warga negara merasa kesusahan oleh karena setiap aturan-aturan yang memiliki kepentingan tersendiri sehingga menimbulkan ketergantungan kepada koneksi informal yang adalah elemen penting dari interaksi negara

³⁸ Aulia Nastiti dan Sari Ratri, *Emotive Politics: Islamic Organizations and Religious Mobilization in Indonesia* (ISEAS, 2018). 200

³⁹ Nastiti dan Ratri. 200

⁴⁰ Nastiti dan Ratri. 201

⁴¹ Robert W. Hefner, ed., *Routledge Handbook of Contemporary Indonesia* (New York: Routledge, 2018).

dengan warga sebagaimana negara pascakolonial. Seringkali koneksi-koneksi ini tercipta menjelang pemilihan-pemilihan lembaga perwakilan formal yang seringkali dilihat sebagai perwakilan rakyat dengan fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan.⁴²

Masyarakat akhirnya melihat hal tersebut sebagai sesuatu yang harus dipertimbangkan sebagai hubungan timbal balik dengan mementingkan kepentingan pribadi mereka melalui relasi informal. Relasi informal yang terjadi ini pada akhirnya membawa ketidakadilan dari pemerintah dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat. Seorang pejabat bukan hanya mewakili dan merealisasikan kepentingan dari orang-orang atau pihak-pihak tertentu saja, tetapi semua warga negara yang dipimpinnya harus dilayaninya.

Pluralitas pada negara ini dapat membawa keuntungan dan di sisi lain juga membawa kerugian dengan beberapa halangan yang muncul akibat tembok perbedaan. Salah satu yang menjadi tembok besar dalam persatuan ataupun persahabatan lintas agama adalah politik identitas yang mencemari pola pikir masyarakat dan politisi.⁴³ Politik identitas, politik radikal, sectarian dan bahkan politik emosi yang muncul ini juga apalagi dari segi keagamaan tidak sedikit dilatarbelakangi dengan adanya pengaruh negatif sehingga menolak keberadaan kepercayaan lain dan bahkan mendiskreditkan agama-agama lain. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengalaman bersama melalui dialog antar agama sehingga tidak ada pengenalan yang mendalam tentang kebaikan yang dapat dirasakan.

Dengan adanya pengalaman tersebut maka lahirlah yang namanya *local wisdom* yaitu kebajikan menghargai dan ikut menikmati kebaikan agama lain.⁴⁴ Selain persahabatan lintas agama, ada juga gagasan tentang Pluralisme keagamaan yang menurut Hefner penggunaan istilah ini membuat demokrasi dapat memberikan ruang yang lebih besar bagi nilai-nilai publik, termasuk juga kelompok-kelompok dengan identitas tertentu. Dengan kata lain pluralisme kewargaan berupaya memperluas ruang pengakuan dari keragaman yang ada di dalam Indonesia yang dipenuhi dengan berbagai macam perbedaan. Tantangan daripada pluralisme kewargaan ini adalah dengan hadirnya struktur ketidakadilan dalam masyarakat di segala bidang kehidupan.⁴⁵

Dikaitkan dengan Pancasila sebagai dasar negara, maka Politik kewargaan ini sangat cocok oleh karena melihat warga negara sebagai prioritas utama dan tidak melihat adanya perbedaan-bedaan satu dengan yang lain. Berbeda dengan gerakan politik yang lain, politik kewargaan juga dapat memberikan kepada masyarakat untuk memberikan pendapat mereka dengan tujuan untuk memajukan negara. John Rawls seorang pemikir Liberal juga memberikan pemahamannya terhadap keragaman yang ada dalam suatu negara dengan memberikan gagasan "*Public Reason*" atau nalar public sebagai metode.

Dengan adanya gagasan ini, maka setiap doktrin dari segi agama ataupun sekular dapat dikemukakan dalam argument politik dengan pengajuan alasan-alasan publik sehingga dapat diterima bukan hanya dari satu pihak atau kelompok tetapi semua kalangan masyarakat. Pada akhirnya, penerimaan secara umum terhadap doktrin-doktrin ini menjadi sebuah bentuk toleransi dari masyarakat dengan menerima perbedaan itu dan melaksanakannya sebagai nilai-nilai kehidupan seperti dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila.

KESIMPULAN

Indonesia adalah salah satu negara dengan letak geografis berupa pulau-pulau. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki berbagai macam keragaman mulai dari suku, ras dan agama ketika menjadi satu negara. Sebagai negara yang Plural ada berbagai macam keuntungan yang didapatkan oleh karena nilai-nilai jual dari budaya maupun keunikan yang ada. Namun selain keuntungan keberagaman yang ada ini juga bisa menjadi kelemahan yang besar dan jika tidak

⁴² Bagir dkk., *Pluralisme Kewargaan*. 43

⁴³ Yahya Wijaya, "Persahabatan Lintas Agama dan Rekonstruksi Identitas Kristen Indonesia," dalam *Agama, Kemanusiaan dan Keadaban: 65 tahun Prof.Dr.KH. Muhammad Machasin, MA.*, ed. oleh Moch Nur Ichwan dan Ahmad Rafiq (Yogyakarta: SUKA PRESS, 2021). 131

⁴⁴ Wijaya. 134

⁴⁵ Bagir dkk., *Pluralisme Kewargaan*. 42

diperhatikan secara kritis akan membawa kehancuran bagi Indonesia. Melihat hal ini, dalam persiapan kemerdekaan Indonesia para pejuang berunding melalui BPUPKI yang kemudian juga melalui PPKI membentuk dasar negara Indonesia yaitu, Pancasila. Pancasila dibentuk dengan cita-cita dapat menjadi nilai pemersatu bagi bangsa Indonesia untuk berjalan ke depan.

Alih-alih menjadi pemersatu bangsa, banyak justru yang tidak menyetujui Pancasila ataupun ada yang merasa bahwa Pancasila hanyalah milik oleh suatu kalangan. Oleh karena itu muncullah gerakan-gerakan politik yang memecah belah seperti Politik Identitas, politik radikal, politik sektarian dan politik emosi. Gerakan-gerakan politik tersebut membuat munculnya diskriminasi antara minoritas dan mayoritas dari perspektif budaya maupun agama. Tidak jarang hal-hal seperti ini berakhir pada tindakan-tindakan anarkis yang justru merugikan negara.

Politik Kewargaan merupakan salah satu gerakan politik yang dapat menjadi perwujudan dari Pancasila untuk menerapkan nilai-nilai persatuan yang ada. Politik kewargaan tidak memunculkan perbedaan-perbedaan dalam praktiknya dan bahkan menjadi suatu anti-tesis bagi relasi-relasi informal yang terbentuk di mana menjadi akar ketidakadilan dalam pelaksanaan pemerintahan di dalam negara. Politik Kewargaan melaksanakan apa yang menjadi cita-cita semua masyarakat sebagaimana Pancasila yang menjadi dasar negara bukan hanya bagi satu orang tapi bagi semua.

KEPUSTAKAAN

- Al-Farisi, Leli Salman. "POLITIK IDENTITAS: Ancaman Terhadap Persatuan dan kesatuan Bangsa dalam Negara Pancasila." *FISIP Universitas Wiralodra* Vol. No. 2 (Februari 2018): 77–90.
- Bagir, Zainal Abidin, AA GN Ari Dwipayana, Mustaghfiroh Rahayu, Trisno Sutanto, dan Farid Wajidi. *Pluralisme Kewargaan: Arah baru Politik Keragaman di Indonesia*. Bandung: MIZAN, 2011.
- Halim, Abdul. *Sosiologi Politik Etnik: Studi Otoritas dan Demokrasi Lokal Masyarakat Madura*. Disunting oleh Rifqy Faiza Rahman. Malang: Inteligencia Media, 2019.
- Hefner, Robert W., ed. *Routledge Handbook of Contemporary Indonesia*. New York: Routledge, 2018.
- Isdiyanto, Ilham Yuli. *Dekonstruksi Pemahaman Pancasila: Mengenal Jati diri Hukum Indonesia*. Disunting oleh Devi. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2019.
- Muhaimin, Aghuts. *Transformasi Gerakan Radikalisme Agama: Dari sentral menjadi lokal*. Bandung: Rasi Terbit, 2019.
- Nastiti, Aulia, dan Sari Ratri. *Emotive Politics: Islamic Organizations and Religious Mobilization in Indonesia*. ISEAS, 2018.
- Nusi, Arfan. "Pemikiran Islam dalam Bingkai Pergolakan Politik Sektarian." *IAIN Sultan Amai Gorontalo* Vol. 2, No. 2 (Desember 2016): 173–88.
- Purnomo, I Made Bagus Andi. *Buku Ajar Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi*. Disunting oleh Komang Agus Widiyantara. Bali: Yayasan Mertajati Widya Mandala, 2020.
- Safitri, Alvira Oktavia, dan Dinie Anggraeni Dewi. "Pancasila Sebagai dasar Negara dan Implementasinya dalam berbagai bidang." *Universitas Muhammadiyah ENREKANG* Vol. 3, No. 1 (2021): 88–94.
- Sembiring, Helena Ras Ulina, dan Ima Rohimah. *Membangun Karakter Berwawasan Kebangsaan*. Disunting oleh Haryanto. Malang: Media Nusa Creative, 2017.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Sejarah Hukum Indonesia*. Jakarta: KENCANA, 2021.
- Van Bruinessen, Martin. "Traditionalist Muslims and Populism in Indonesia and Turkey." *AFKAR* Vol. 40 (2021): 1–27.
- Wijaya, Aksin. *Berislam Di Jalur Tengah*. Yogyakarta: DIVA PRESS, 2020.
- Wijaya, Yahya. "Persahabatan Lintas Agama dan Rekonstruksi Identitas Kristen Indonesia." Dalam *Agama, Kemanusiaan dan Keadaban: 65 tahun Prof.Dr.KH. Muhammad Machasin, MA.*, disunting oleh Moch Nur Ichwan dan Ahmad Rafiq. Yogyakarta: SUKA PRESS, 2021.